

Narasi Moderasi Beragama dalam Manuskrip Melayu Kawasan Borneo: Sebuah Model Penerapan Pendidikan Inklusi

Iskandar¹, Materan²

¹ UINSI Samarinda, Indonesia; abusyla@gmail.com

² UINSI Samarinda, Indonesia; materan_daha@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Narrative;
Religious Moderation;
Manuskrip;
Borneo Malay;
Inclusive Education

Article history:

Received 2024-10-14

Revised 2024-11-20

Accepted 2024-12-13

ABSTRACT

Manuskrip-based religious moderation narratives remain rarely studied, although manuscripts contain valuable thoughts and experiences that can serve as models for developing religious moderation in the homeland, especially in modern education. There are three Borneo Malay manuscripts worthy of exploration in terms of their narratives: the Panji Salatin manuscript (1605-1635), the Hikayat Banjar Manuscript (1859), and the Pangeran Syarif Manuscript (1870). This research aims to explore the narrative forms and moderation values contained within them. Based on philological and historical approaches, it can be concluded that: a. The Borneo Malay manuscripts contain various narratives, namely: juridical narrative, historical narrative, and prose literary narrative. b. The Borneo Malay manuscripts contain principles and symbols of religious moderation, including: principles of equality and justice, principles of preservation and respect for local culture, principles of non-violence, cultural symbols, and language; c. The principles and symbols of religious moderation contained in the Borneo Malay Manuscripts provide important implications for the development of inclusive education today.

This is an open access article under [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding authors:

Iskandar

UINSI Samarinda, Indonesia; abusyla@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Moderasi beragama bukanlah sebuah wacana baru, tetapi sebuah wacana yang sudah aja bahkan sejak pewahyuan Kitab Suci al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW dinobatkan menjadi rasul. Wacana moderasi beragama terefleksi dalam beberapa ayat al-Quran dan beberapa sunnah Rasulullah hingga dalam sikap kehidupan sosial keagamaan sejumlah sahabat. Moderasi beragama menjadi norma universalitas Islam ketika al-Quran dan Sunnah memuat dan menjabarkan betapa pentingnya arti sebuah keadilan, keberimbangan, dan sikap saling menghargai (toleransi) antar berbagai elemen masyarakat.

Wacana moderasi beragama menjadi penting mengingat masih adanya fikiran dan gerakan yang tergolong ekstrim dan yang tergolong liberal di tengah komunitas yang mengatasnamakan Islam.

Pemahaman yang ekstrim melahirkan sikap beragama yang kaku, keras, dan fanatis, hingga berujung pada klaim kebenaran sepihak dengan menyalahkan orang lain (Ghuluw, 2016). Sementara pemahaman yang liberal melahirkan sikap beragama yang bebas, individualis tanpa batas, bahkan menganggap semua agama adalah sama, sehingga setiap agama tidak lagi memiliki identitas privasi yang sakral dan profan.

Upaya untuk menggalakkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai universal Islam mengenai keadilan, keberimbangan, dan toleransi Islam dalam arti sesungguhnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, baik di lingkungan pendidikan tingkat paling rendah hingga ketinggian tinggi, bahkan di lingkungan sosial dan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama RI sejak beberapa tahun terakhir dengan program bertajuk “penguatan moderasi beragama” (RI, 2024). Lewat laman resmi Kementerian Agama RI, <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama>, penguatan moderasi beragama menjadi isu sentral pemberitaan.

Salah satu cara untuk mewujudkan penguatan moderasi beragama adalah dengan mengkaji prinsip dan bentuk moderasi beragama yang ada dalam khazanah manuskrip klasik, sebuah narasi tulisan tangan para ulama dan orang-orang terpelajar tempo dahulu yang pernah berjasa membentuk masyarakat bangsa Indonesia yang aman Sejahtera (*Manuskrip di Indonesia diyakini jumlahnya ratusan bahkan ribuan, namun tidak semua terdokumentasikan dengan baik. Kementerian Agama RI, lewat situs <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/> sudah menyimpan sejumlah manuskrip yang terdata sejak tahun 2013-20, n.d.*).

Manuskrip melayu adalah contoh manuskrip yang amat populer sebagai objek kajian dalam dunia pernaknahan klasik, karena isinya disamping memuat sejarah raja-raja dan tatanan kehidupan masyarakat yang menarik, juga memuat gubahan sastra (seperti sajak dan puisi) budaya dan bahasa yang indah. Manuskrip melayu kawasan Borneo (belakangan terkenal dengan sebutan “Kalimantan”) terdiri dari Kawasan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Pada setiap kawasan memiliki manuskrip yang sangat terkenal, seperti manuskrip “Salasila Kutai” dan “Panji Selatin” dari Kesultanan Kutai Kartanegara dari Kalimantan Timur, manuskrip “Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kotaringin” terkenal juga dengan “Hikayat Lambu Mangkurat” dari Kalimantan Selatan, serta manuskrip Kesultanan Pontianak hasil koleksi H. Abdurrahman Husin Fallughah alMaghfurah yang berasal dari Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian untuk melacak kembali sumber inspiratif dari naskah-naskah melayu kuno sebagai karya tokoh dan ulama masa lalu, dianggap menjadi kebutuhan yang sangat penting. Persoalan utama yang bisa digali adalah: Apa prinsip moderasi beragama yang mereka jadikan sebagai patokan, dan bagaimana bentuk-bentuk moderasi beragama yang pernah mereka jalankan dan alami. Narasi yang tergambar dari manuskrip ketiga kawasan ini diharapkan dapat memunculkan sebuah model bagi pendidikan inklusi sesuai dengan system kearifan lokal yang ada. Dengan demikian, diangkatlah penelitian ini dengan judul: “Narasi Moderasi Beragama dalam Manuskrip Melayu Kawasan Borneo: Sebuah Model Penerapan Pendidikan Inklusi”.

Masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana bentuk dan tujuan narasi yang digunakan dalam manuskrip melayu Kawasan Borneo?, Apa saja nilai-nilai moderasi beragama yang tercermin dalam narasi manuskrip melayu Kawasan Borneo? dan bagaimana implikasinya dalam pendidikan inklusi saat ini. Berdasarkan masalah ini, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk dan tujuan narasi yang ada dalam manuskrip, dan menggali nilai-nilai moderasi beragama yang ada di dalamnya. Sehingga manuskrip kuno tetap memiliki signifikansi historis yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan sistem pendidikan sekarang dan yang akan datang.

Penelitian tentang moderasi beragama secara umum sudah banyak dilakukan, diantaranya: pertama, dilakukan oleh Fahri, Mohamad dan Zainuri, Ahmad dalam jurnal *Intizar* Vol.25, No.2 terbitan Desember 2019 berjudul “Moderasi Beragama di Indonesia” (Fahri Mohamad, 2022). Tujuan penulisannya adalah untuk menggambarkan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan. Dalam kesimpulannya

peneliti menyatakan bahwa melalui melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif, maka radikalisme atas nama agama dapat diberantas". Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap seperti *tasamuh* (toleransi), *i'tidal* (lurus), *tawazun* (seimbangan), *musyawarah*, *musawah* (egaliter), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *ishlah* (reformasi), dan *tathawur wa al-ibtikar* (dinamis dan inovatif).

Kedua, oleh Akhmadi, Agus dalam Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, no. 2, Pebruari-Maret 2019 menulis tentang "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia" (Akhmadi, 2019). Penulisannya ini bertujuan mengulas keragaman budaya masyarakat Indonesia, moderasi beragama dalam keanekaragaman dan peran penyuluh agama untuk melahirkan ketentraman kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka. Penulisan ini menghasilkan kesimpulan, bahwa dalam kehidupan keragaman budaya diperlukan pemahaman dan kesadaran agar bisa saling harga-menghargai dalam perbedaan, keanekaragaman dan bisa berinteraksi dengan siapapun secara terbuka. Pada bagian akhir penulisan memuat rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama agar turut berperan serta mensosialisasikan dan menumbuh-kembangkan moderasi beragama pada masyarakat demi terwujudnya nilai kehidupan yang harmonis penuh kedamaian.

Ketiga, oleh Nurdin, Fauziah menulis dalam *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah:Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* dengan judul "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadits". Judul tulisan ini dimuat pada Vol.18, No.1, bulan terbit Januari 2021 (Nurdin, 2021). Artikel jurnal ini bertujuan untuk melihat apakah akar dan potensi kekerasan ummat Islam dan teror kepada pemeluk agama lain bersumber pada Kitab Suci Qur'an dan Hadis. Metode yang digunakan peneliti adalah metode tafsir tematik, yaitu dengan menetapkan satu topik dan mengumpulkan sejumlah ayat dan hadis terkait dengan moderasi beragama. Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa Quran dan Hadis tidaklah memiliki akar dan potensi bagi umat Islam untuk melakukan kekerasan dalam kehidupan keagamaan Masyarakat (Nurdin, 2021).

Keempat, oleh Irama, Yoga dan Liliek Channa AW menulis dalam *Mumtaz*, sebuah jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman dengan judul "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis". Pada Vol.5, No.1 terbitan tahun 2021 ini (Irama & AW, 2021), penulis mengkaji makna moderasi dalam berbagai hadis Nabi. Lewat jurnal ini, peneliti memberikan simpulan bahwa idealitas moral yang ada dalam moderasi agama adalah bertujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan agama-agama dalam perilaku hidup damai.

Kelima, oleh Farida, Umma melalui jurnal berjudul "Kontribusi dan Peran KH. Hasyim Asy'ari dalam Membingkai Moderasi Beragama Berlandaskan al-Quran dan Hadis di Indonesia". Dalam jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan dengan nama, *Fikrah*, pada Vol.8 No.2 terbitan tahun 2020 ini (Farida, 2020), penulis bertujuan mengungkap fikirarn dan gagasan K.H. Hasyim Asy'ari dalam membentuk kesatuan ummat yang moderasi berbasis Quran dan Hadis dalam konteks kehidupan berbangsa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses persatuan dan kesatuan masyarakat agama dan bangsa, K.H. Hasyim Asy'ari telah mengambil peran pentingnya. Fikiran dan gagasan moderasi beragamanya tertuang dalam karya yang ditulisnya berjudul *Risalah Ahlussunah wal Jama'ah*.

Keenam, oleh Muhtar, Muhammad Zakki melalui *Jurnal Lektur Keagamaan* dengan judul "Moderasi Beragama Dalam Kitab Tasawuf alMuntakhabat Karya K.H. Ahmad Asrori Al-Ishaqi", bermaksud melacak sikap moderat dalam tarekat. Pada edisi ke-19 No.1 tahun 2021 (Muhtar, 2021), penulis menggali lebih dalam tentang ajaran tasawuf corak falsafi, akhlaqi, dan amali dan kaitannya dengan nilai-nilai moderat dan toleransi. Penulis menggunakan pendekatan social historis dan hermeneutis untuk membuktikan bahwa kitab al-Muntakhabat merupakan pedoman bagi para suluk (pengamal), sehingga menjadi warna penting dalam memaknai moderasi dan toleransi.

Berdasarkan tinjauan Pustaka di atas, maka tidak ada satupun yang secara khusus meneliti tentang narasi moderasi beragama berbasis manuskrip, terutama manuskrip melayu di Kawasan

Borneo. Oleh karena itu, objek dan jenis penelitian ini merupakan penelitian tersendiri, yang masih tergolong langka dalam gerakan penguatan moderasi beragama.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan objek berupa narasi moderasi beragama sebagaimana tercermin dalam manuskrip melayu di Kawasan Borneo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan filologis dan historis, yaitu melacak, menginventarisir dan memahami isi manuskrip klasik hasil karya tulisan tangan ulama masa lalu untuk ditempatkan dalam konteks kesejarahan masa lalu dan kaitannya dengan masa sekarang.

Data utama penelitian adalah manuskrip melayu Borneo, meliputi manuskrip yang ada di kawasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Data-data berupa manuskrip ini diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara hunting ke tangan/orang yang memiliki (menyimpan) naskah terkait, dan melacak lewat sistem katalog Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Nasional. Sedangkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi: inventarisasi Naskah, Kritik naskah, dan kontekstualisasi dan refleksi teks, sehingga terbentuk satu kerangka konseptual yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Moderasi Beragama dan Manuskrip Melayu Borneo

Narasi Moderasi Beragama terdiri dari kata “narasi” dan moderasi beragama”. Kata “narasi” adalah alur kata dan bahasa yang dibentuk untuk menyampaikan fikiran dan pesan dalam bentuk tulisan. Sedangkan “moderasi beragama” adalah cara pandang, sikap, dan perbuatan yang didasarkan pada keyakinan beragama secara berkeadilan, berimbang dan toleran. Keyakinan beragama ini akan tercermin dalam kehidupan pribadi dan hubungannya dengan kehidupan orang lain, secara perorangan maupun komunitas dan bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Rohman, Akmansyah, & Mukhibat, 2022).

Narasi moderasi beragama dengan demikian dimaksudkan sebagai alur bahasa dan fikiran yang dibentuk menjadi konsep dan kemudian tertuang dalam kata-kata tertulis. Sedangkan “Manuskrip Melayu” dalam penelitian ini dimaksudkan adalah karya tulis tangan yang menggunakan bahasa melayu (Indonesia), baik menggunakan hurup latin maupun yang menggunakan hurup melayu arab (huruf pegon). Adapun “Kawasan Borneo” dimaksudkan adalah kawasan kepulauan yang sekarang lebih dikenal dengan kepulauan Kalimantan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilahan kawasan Borneo dimaksudkan sebagai pembeda dengan kawasan Melayu Kepulauan Riau dan Kawasan lain di kepulauan Sumatera. Kawasan Borneo (Kalimantan) dalam penelitian ini dimaksudkan meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Manuskrip melayu yang terkenal di masing-masing Kalimantan ini adalah manuskrip Kesultanan Kutai Kartanegara yang berasal dari Kalimantan Timur, manuskrip Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kotaringin (juga terkenal dengan sebutan Hikayat Lambu Mangkurat) yang berasal dari Kalimantan Selatan, dan manuskrip Syair Pangeran Syarif yang berasal dari kesultanan Pontianak Kalimantan Barat.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka ditemukan gambaran tentang narasi yang digunakan dalam manuskrip Melayu Borneo dan nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung di dalamnya.

a. Narasi Manuskrip Melayu Borneo

Narasi merupakan bentuk dari pengembangan paragraf dalam karangan atau naskah yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian secara berurutan dari waktu ke waktu yakni awal, tengah sampai akhir. Narasi terkadang disajikan berdasarkan plot atau alur di mana ada sebuah

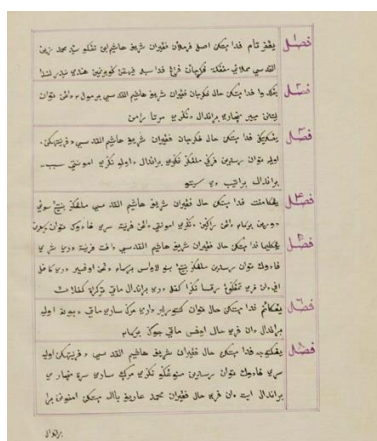
peristiwa, konflik dan juga tokoh. Narasi manuskrip Melayu Borneo berisi tentang cerita berdasarkan fakta yakni narasi ekspositoris atau cerita fiksi yakni narasi sugestif. Bentuk narasi yang ditemukan dalam manuskrip Melayu Borneo meliputi:

Pertama, Narasi Undang-undang, seperti manuskrip Panji Salaten sehingga manuskrip ini lebih dikenal sebagai naskah undang-undang sebagai peraturan pemerintahan/kesultanan. Manuskrip ini dinarasikan dalam bentuk pasal demi pasal, seperti tergambar pada pasal 14 dalam naskah Panji Salaten menyebutkan bahwa: “Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja biasanya (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Raja umpamanya pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri.”

Kedua, Narasi Sejarah, seperti terdapat dalam manuskrip Hikayat Raja Banjar dan Kotaringin. Dalam manuskrip ini isi sejarah diurai dari peristiwa awal hingga peristiwa akhir secara berurutan. Gambaran narasi sejarah ini terlihat dalam kalimat seperti:

Maka adalah ia beranak seorang laki-laki dan dinamainya Empu Jatmika, dan dinamainya isterinya Saudagar Mangkubumi itu Siti Rara. Maka Empu Jatmika itu beristeri Sri Mangun itu beranak laki-laki dua orang namanya, yang tua itu Empu Mandastana namanya, dan yang muda itu bernama Lambu Mangkurat.

Ketiga, Narasi Sastra Budaya, seperti terdapat dalam manuskrip Syair Pangeran Syarif. Manuskrip ini memuat sebanyak 23 pasal, dan setiap pasal merupakan sub bab bahasan yang berbeda dalam manuskrip.



Gambar 1. Contoh Isi Pasal-pasal pada Manuskrip Syair Pangeran Syarif

Manuskrip syair pangeran Syarif Hasyim menjelaskan tentang sejarah perjalanan Pangeran Syarif Hasyim dan perang di Banjarmasin sejarah memang selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena dengan kita mengingat sejarah kita tidak akan lupa terhadap perjuangan bangsa kita setiap negara pasti memiliki sejarah yang dimiliki hal yang sudah terlewat merupakan hal yang sangat sulit untuk kita ketahui jika tidak ada media yang memberitahukan kita, contohnya seperti manuskrip yang ditulis tangan dan memberikan pengetahuan baru untuk orang zaman sekarang yang asalnya tidak mengenal hal yang terjadi zaman dahulu sekarang sedikit-sedikit lebih memahami lewat manuskrip yang ditemukan.

Manuskrip di atas memiliki dua sejarah yang harus kita ketahui pertama adalah menceritakan tentang Pangeran Syarif Hasyim yang merupakan seseorang yang gagah berani yang ditugaskan untuk memberantas brandal-brandal yang membrontak pada pemerintahan belanda, pada masa Mayor Vespijk menjadi residen di Banjarmasin, sejarah menceritakan brandal-brandal yang memberontak dipimpin oleh hidayatullah, pembontakan makin menjadi-jadi sehingga regen belanda terbunuh, sehingga pangeran Syarif Hasyim melancarkan serangan terhadap benteng-benteng gerombolan yang memberontak sehingga Hidayatullah merasa terdesak dan meminta ampun dengan menyerahkan diri, dan Hidayatullah pun menjadi tahanan, tetapi ketika tahu akan

dipindahkan ke Betawi maka Hidayatullah pun melarikan diri, sehingga pangeran Syarif Hasyim mencari dan menahan seluruh keluarga Hidayatullah anak beserta istrinya, sehingga membuat Hidayatullah resah dan akhirnya menyerahkan diri lagi kepada pemerintahan. Kemudian Hidayatullah dibawa ke Betawi dengan aman.

Selanjutnya pangeran Syarif Hasyim diangkat mejadi raja di kerajaan canal manunggal, dan misi menumpas pemberontakan masih berlanjut, pemebrontakan yang dipimpin oleh Damang Wungkwang yang membrontak di Banjarmasin. kemudian Pangeran Syarif Hasyim mendapat bantuan dari jepang dan akhirnya Damang Wungkwang bisa dilumpuhkan, kemudian Banjarmasin aman dengan kepemimpinan Pangeran Syarif Hasyim.

Selanjutnya sejarah yang kedua yaitu peperangan yang terjadi di Banjarmasin peperangan ini adalah perang menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh para berandal yang tidak patuh pada pemerintahan pada naskah manuskrip yang ditemukan oleh penulis perang di sini yaitu pada saat indonesia masih dikuasai oleh Belanda dan kerajaan masih mendukung dengan pemerintahan Belanda dengan pusat pemerintahan oleh Mayor Vespijk yang menjadi residen di Banjarmasin, peperangan dengan para pemberontak yang paling terkenal adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Hidayatullah, yang meresahkan pemerintahan hingga akhirnya bisa diredam dan Banjarmasin kembali menjadi aman.

Berdasarkan tujuan narasi, maka manuskrip Melayu Borneo dalam dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tujuan, masing-masing: a. bertujuan informative, narasi yang punya tujuan tunuk memberi informasi akurat tentang sebuah peristiwa supaya bisa memperluas pengetahuan orang tentang seseorang, b. bertujuan ekspositoris, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi tentang sebuah kejadian atau peristiwa dengan akurat untuk memperluas pengetahuan tentang kisah dari seseorang. Dalam narasi ini, penulis akan menceritakan kejadian atau peristiwa atas dasar data atau sesuai dengan faktanya. Tujuan ini tercermin dalam manuskrip HikayatBanjar, dalam narasi:

Maka Saudagar Mangkubumi itu berpesan kepada anaknya, katanya, "hai anakku Empu Jatmika, adapun wasiatku itu pakai lamun aku sudah mati baik-baik engkau lawan sahabat handai-handaimu lawan segala hambamu supaya kasih kepadamu dan jangan kamu kikir hendak berbuat murah, dan kehendaklah berbuat sabar supaya orang tiada dengki kepadamu, jangan kamu menyakiti hati orang, orang pun benci kepadamu, jangan kamu mengambil milik orang yang tiada patut dengan kesalahannya hukumnya itu datang kisas Tuhan kepadamu.

Selain tujuan tersebut, juga terdapat tujuan artistik, yaitu narasi yang bertujuan untuk bisa memberikan makna tertentu dengan cara mengirimkan pesan terselubung pada pembaca atau pendengar sehingga ia terlihat seperti sedang melihatnya. Ketentuan ini menyangkut pemakaian bahasa yang logis, atas dasar fakta yang tersedia dan juga tidak terdapat unsur objektif atau sugestif.

Narasi ini juga bertujuan untuk memberikan informai tentang sebuah kejadian atau peristiwa dengan akurat untuk memperluas pengetahuan tentang kisah dari seseorang. Dalam narasi ini memuar cerita, kejadian atau peristiwa atas dasar data atau sesuai dengan faktanya. Pelaku dalam narasi ini umumnya hanya satu orang yang kemudian menceritakan tentang masa kecil hingga saat ini atau bisa juga hingga akhir hidupnya.

Tujuan narasi artistik ini terlihat dalam manuskrip Syair Sarif Hasyim. Dalam manuskrip ini memuat gambaran berbagai informasi zaman dahulu yang tidak dirasakan oleh masyarakat zaman sekarang, manuskrip ini memberikan keilmuan yang mendalam lewat tulisan tangan para terdahulu, untuk itu perlu merawat budaya dan warisan terutama yang berbentuk manuskrip, akses untuk mempelajari itu sangatlah terbuka bagi kita dengan kemodernan zaman yang semakin hari semakin canggih, sehingga untuk menemukan manuskrip sudah begitu mudah tinggal keilmuan dalam bidang itu yang harus kita olah dan kita tingkatkan agar kita bisa memahami dan mengetahui isi dari kandungan manuskrip yang ada, salah satu keilmuan yaitu dengan mempelajari Filologi yang berfokus terhadap manuskrip, disusuk dengan ilmu Kodikologi dan bisa juga paleografi.

b. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Manuskrip Borneo

1). Pilar Moderasi

Adad beberapa pilar penting moderasi beragama yang ditemukan dalam manuskrip Melayu Borneo, pertama: keterbukaan dan egalitarian, seperti tercermin dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten yang menyatakan, bahwa sistem kerajaan dibangun dengan ketaatan terhadap hasil mufakat yang telah disetujui pula oleh raja, dan pelanggaran atasnya merupakan sanksi berat:

Pasal 9: "... hukum negeri. Ialah dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumannya".

Akan tetapi pada sisi lain, Undang-undang ini juga merumuskan tentang aktivitas Raja/Sultan yang secara berkala akan mendengarkan kritik, saran, masukan, dan pertimbangan dari para Menteri atau pejabat kesultanan demi kemajuan kesultanan (Pasal 18).

Pasal 39: "Adat besar Raja tiada bercerai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata mufakat ialah yang menjadi adat yang diadatkan Sebagai adat yang diadatkan menjadi sabda Pandita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar sabda Pandita Ratu artinya memoto' lidah Raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadatkan, ialah putusan dalam badai orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Hal ini merupakan cerminan keterbukaan dari suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Kedua, pilar keadilan, seperti juga tercermin dalam Undang-undang Dasar Panji Salaten ketika menyebutkan bahwa Raja/Sultan menempati urutan paling tinggi dan merupakan orang yang paling berkuasa dalam struktur pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Raja/Sultan didudukkan sebagai orang nomor satu berdasarkan pemahaman bahwa seorang Raja/Sultan dipercaya mampu menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Mengenai hal ini, Pasal 14 Undang-undang Dasar Panji Salaten menyebutkan bahwa: "Raja orang yang mulia, turun-temurun memang asalnya raja. Raja basanya (perkataannya) membawa tuah, yang menjadi nyawa dalam negeri. Raja umpamanya pohon waringin. Tempat berteduh di waktu hujan, wadah bernaung di kala panas. Batangnya tempat bersandar. Menjadi alamat di dalam negeri." Pilar keadilan ini juga tercermin dalam Hikayat Banjar ketika memperlakukan antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap kedudukan sang raja. Dalam hal ini disebutkan:

Maka segala hamba raja itu sama suka hatinya dan keluarganya dan sahabatnya dan handainya itu sama suka ia mendengar Empu Jatmika menjadi raja itu, sama lompat dengan anak isterinya diam di Negeri Dipa itu.

Adapun orang yang lain-lain daripada sahabat handainya itu mendengar Empu Jatmika yang demikian itu setengah dengki, katanya, "hai Empu Jatmikia, mudah-mudahan peroleh kebinasaan jua engkau sampai kepada anak cucunya karena bukan asal raja menjadikan dirimu raja."

Kata yang setengah yang baik hatinya, "hai Empu Jatmika, "mudah-mudahan kekallah ia menjadi raja sampai kepada anak cucunya kalau aku atau an akku atau cucuku dipeliharakannya terkenangnya sama asal orang Keling terkenangnya sama asal orang Negeri Keling (hlm.16) ini." Itulah yang baik hatinya

2). Prinsip-prinsip Moderasi

Selain pilar moderasi bergama, manuskrip Melayu Borneo mengungkapkan prinsip-prinsip penting moderasi, yaitu: pertama, menghargai kearifan lokal. Dalam naskah Panji Salatien pasal 1 dinyatakan: Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegra Ing Martapura, ialah yang Beraja, Bermentri, Berorang Besar, Berhulu balang, Berhukum dengan Adatnya, Bershara' Islam dengan Alim Ulamanya. Yang berpunggawa, Berpetinggi, Berdusun, Berkampung, Bernegeri dan teluk rantaunya, Berpanglima angkatan perbalanya.

Berdasarkan pasal 1 ini, maka terlihat jelas bahwa struktur pemerintahan kerajaan Kutai telah tertata demikian rupa dan elit tertinggi yaitu raja sebagai struktur terendah yaitu bernegeri. Segala

bentuk kebijakan penguasa tidak dapat ke luar kecuali ada kata mufakat (musyawarah) dan ini merupakan institusi hukum adat yang diadatkan dengan tetap berpedoman pada shara'.

Dalam pasal 9 dan pasal 39 dinyatakan:

Pasal 9: "Yang disebut adat yang diadatkan, ialah adat hukum negeri. Ialah dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, jika siapa juapun merusaknya dinamakan ingkar dan mati hukumannya".

Pasal 39: "Adat besar Raja tiada bercerai. Segala mufakat itu dan putus dalam balai dan dibenarkan oleh Raja membenarkan kata mufakat ialah yang menjadi adat yang diadatkan. Sebagai adat yang diadatkan menjadi sabda Pandita Ratu yang tiada bisa berubah kecuali dengan mufakat. Barang siapa yang melanggar sabda Pandita Ratu artinya memoto' lidah Raja, maka mati jua hukumnya dengan tiada ampunannya. Adat yang diadatkan, ialah putusan dalam badai orang-orang besar dan segala orang yang arif bijaksana. Jika dimufakati ia dibenarkan oleh Raja dan diadatkan di dalam negeri dan teluk rantaunya...".

Dalam pasal 3 justru ditegaskan bahwa antara hukum adat dan shara' tidak dipertentangkan Mempunyai hukum dengan adatnya, bershara' Islam dengan agamanya. Dan pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa ada empat jenis adat yang berlaku, 1) adat yang menang, 2) adat yang diadatkan, 3) adat yang teradat, dan 4) adat istiadat atau disebut tata krama. Kemudian dipertegas pada pasal 12 bahwa: Hidup dipangku adat, mati dipangku tanah. Shara' menaiki adat menurun.

Dari beberapa pasal yang diuraikan di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa kebijakan hukum yang diterapkan kesultanan adalah hukum adat yang telah dimasuki oleh nilai-nilai shara'. Dengan kata lain bahwa hukum adat yang diterapkan di kesultanan Kutai adalah hukum Islam yang sesungguhnya telah mengalami adaptasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Di sini letak "kearifan hukum" antara hukum Islam dan hukum adat.

Kedua, prinsip anti kekerasan, sebagaimana tercermin dalam manuskrip Hikayat Banjar dalam narasi: Sudah kemudian itu segala menteri-menteri Sakira semuanya dijamunya oleh Arya Magatasari dan Tumenggung Tanah Jiwa makan yang nikmat-nikmat dan minum-minuman yang lezat-lezat dan semuanya dipersalinnya menteri-menteri Sakira itu, sudah itu semuanya disuruhkan pulang masing-masing ke negerinya. Maka rasa hati segala Sakira itu suka ia rupanya raja itu karena semuanya negeri satu-satu Sakira itu mufakat tiada lagi bunuh membunuh karena baik tata istilah perintah Tumenggung Tanah Jiwa itu Tatkala Arya Magatsari menyerang menundukkan Batang Tabalung dan Batang Balangan dan Batang Pitu dan serta bukitnya itu membawa orang seribu, dan Tumenggung Tanah Jiwa membawa orang seribu jua tatkala ianya menundukkan orang Batang Ali dan Hamandita dan Labuan Emas serta ia bukitnya itu jumlahnya orang dua ribu itu, seorang pun itu tiada yang mati daripada bijaksananya Arya Magatsari dan Tumenggung Tanah Jiwa itu, maka sekalian mereka itu tunduklah dan kasih hatinya itu.

3). Simbol-simbol Moderasi

Dalam manuskrip Melayu Borneo ditemukan setidaknya tiga simbol utama moderasi beragama, yaitu simbol bahasa, simbol historis, dan simbol budaya berupa pakaian adat. Simbol bahasa ditemukan misalnya dalam undang-undang Panji Selaten, pasal 1, dinyatakan: "Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura, ialah yang Beraja, Bermentri, Berorang Besar, Berhulu balang, Berhukum dengan Adatnya, Bershara' Islam dengan Alim Ulamanya.

Pasal 1 Undang-undang Panji Salatin ini mengungkap dua klausa yang sangat penting, yaitu "Berhukum dengan Adatnya, Bershara' Islam dengan Alim Ulamanya". Berhukum dengan adat berarti menjadikan adat-istiadat yang berlaku dimasyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup di dalam masyarakat, sedangkan bershara' Islam berarti menjadikan agama Islam sebagai hukum syara' yang mengikat bagi masyarakat pemeluk beragama Islam. Sedangkan simbol historis ditemukan dalam Upacara "erau" bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Simbol ini merupakan ejawantah dari pasal 1 Naskah Undang-undang Panji Salatin yang menyebutkan, bahwa:

Yang bernama kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura ialah yang Braja, Bermenteri, berorang besar, berhulubalang, berhukum dengan adatnya, bersyak Islam dengan alim ulamanya". Yang berpongawa, berpetinggi, berdusun, berkampung, bermenteri dan teluk rantaunya berpaling angkatan perbalanya.

Terlihat pada diri Aji Pangeran Simun Panji Mandapa sifat-sifatnya yang ambisius yang dibuktikan dengan merebut wilayah kerajaan Kutai Mulawarman. Bahkan kemudian sang raja mengembangkan upaya-upaya untuk mempertahankan dominasinya melalui rekayasa ideologi kerajaan, yang terutama disosialisasi melalui Erau.

Dalam penelitian mengenai "Erau: Ritual politik dan kekuasaan", M. Yamin Sani memperlihatkan (Sani 2012), bahwa Kitab Undang-Undang Dasar Panji Selaten, sesungguhnya merefleksikan sebuah sentralisasi politik kerajaan dengan "sistem nilai pusat" masyarakat dan sistem kelembagaan pusat yang disahkan oleh sistem nilai itu. Disebut pusat karena hubungan dekatnya dengan apa yang diyakini masyarakat sebagai sakral; dan dikatakan pusat karena didukung oleh pejabat-pejabat yang berkuasa dalam masyarakat. Geertz melihat fenomena kerajaan-kerajaan lokal seperti ini, menyebutnya sebagai sifat ekspresif, dimana pusat sebagai teladan, yaitu ide-ide bahwa raja dan keratonnya otomatis merupakan suatu mikrokosmos dari tatanan supranatural, dan penjelmaan fisik suatu tatanan politik.

Adapun simbol budaya, dapat dilacak dalam manuskrip Hikayat Banjar, ketika raja memperkenalkan baju adat sebagai salah satu media pemersatu masyarakat. Dalam manuskrip ini dinarasikan: Kemudian daripada itu maka istilah tahta kerajaan Raja Nagara Dipa itu terlalu masyhur baik tahtanya karena menurut tahta istilah Raja Majapait itu menurut cara Jawa itu serta pakaian itu menurut cara Jawa itu sama sudah tinggalnya segala tahta istilah pakaian di Negeri Keling itu oleh segala orang yang di negeri Nagara Dipa itu, besar kecil laki-laki dan perempuan itu sama memakai pakaian cara Jawa sekaliannya itu, dan kata raja nagara Dipa itu tatkala dihadap segala menteri dengan rakyatnya pada Siti Luhar, kata raja, "hai sekalian orang di negeri Nagara Dipa jangan lagi engkau sekaliannya itu memakai seperti pakaian orang Melayu atau pakaian orang Walanda atau pakaian orang Cina atau orang Siam atau orang Aceh atau orang Mangkasar atau orang Bugis atau orang negeri lain sekaliannya itu jangan diturut semuanya meski pakaian cara adat kita lagi di Negeri Keling itupun jangan lagi diturut karena kita sudah berlain negeri karena kita sudah berbuat negeri sendiri menurut tahta istilah cara negeri maharaja Majapait, maka pakaian kita pakai cara orang Jawa.

4). Implikasi Narasi Moderasi Beragama Manuskrip Melayu Borneo dalam Pendidikan Inklusi

Pertama, Transformasi Nilai Kesetaraan dan Keadilan. Prinsip kesetaraan dan keadilan yang tercermin dalam manuskrip Melayu Borneo dapat ditransformasikan ke dalam sistem pendidikan modern melalui pengembangan kurikulum yang inklusif dan berkeadilan. Implementasinya dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat (Rahman & Arifin, 2023). Nilai-nilai ini sejalan dengan konsep pendidikan demokratis yang menjadi landasan pendidikan nasional.

Kedua, Penguatan Kearifan Lokal. Prinsip pelestarian dan penghargaan terhadap budaya lokal yang termuat dalam manuskrip Borneo dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran melalui pendekatan kontekstual. Pembelajaran berbasis kearifan lokal memungkinkan peserta didik memahami dan menghayati nilai-nilai budaya sambil mengembangkan identitas kulturalnya (Widodo & Supardi, 2023). Model pembelajaran ini efektif dalam membentuk karakter yang moderat dan menghargai keberagaman.

Ketiga, Pengembangan Pendidikan Anti Kekerasan. Prinsip anti kekerasan yang tercermin dalam manuskrip Hikayat Banjar dapat diadaptasi menjadi program pendidikan perdamaian. Implementasinya mencakup pengembangan metode pembelajaran kolaboratif, resolusi konflik, dan penguatan dialog antarbudaya (Hasanah & Nurdin, 2024). Pendekatan ini penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya harmoni sosial dan toleransi.

Keempat, Integrasi Simbol Budaya. Simbol-simbol budaya dalam manuskrip Melayu Borneo dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif. Penggunaan simbol-simbol ini dalam pembelajaran dapat memperkuat pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai moderasi beragama sekaligus melestarikan warisan budaya lokal (Mahmud & Syafrudin, 2023). Integrasi ini dapat dilakukan melalui pembelajaran tematik yang menghubungkan nilai-nilai tradisional dengan konteks modern.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang dilakukan, maka disimpulkan: Pertama, bahwa manuskrip kesultanan Borneo memuat narasi yang beragam, yaitu: a. narasi informatif dalam bentuk undang-undang dan bertujuan untuk mengikat masyarakat secara repressif, sebagaimana terdapat dalam manuskrip Panji Salatin Kesultanan Kutai Kartanegara; b. narasi historis dalam bentuk prosa yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan luas kepada pembaca, sebagaimana termuat dalam manuskrip Hikayat Banjar dan Kotaringin; c. narasi sastra dalam bentuk prosa untuk menggambarkan suasana multi etnis dan budaya masyarakat, sebagaimana termuat dalam manuskrip Syair Pangeran Syarif, Pontianak. Kedua, bahwa manuskrip kesultanan Borneo mengandung prinsip-prinsip dan simbol-simbol moderasi keberagaman, berupa: a. prinsip kesetaraan dan keadilan di depan hukum, sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal manuskrip Panji Salatin; b. pelestarian dan penghargaan terhadap budaya lokal, seperti tradisi "erau" sebagai simbol kebersamaan, anti kekerasan dalam masyarakat Kutai Kartanegara dan tradisi menggunakan "pakaian adat" sebagai simbol budaya lokal yang harus dipelihara bagi masyarakat, sebagaimana tertera dalam manuskrip Hikayat Banjar; c. Pitutur atau petuah bijak sebagai simbol bahasa persatuan dan kesatuan, serta komitmen pada ajaran agama yang dianut. Ketiga, prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Manuskrip Borneo memberikan nilai penting bagi penerapan dan pengembangan pendidikan inklusi, meliputi: Transformasi Nilai Kesetaraan dan Keadilan, Penguatan Kearifan Lokal, Pengembangan Pendidikan Anti Kekerasan, dan Integrasi Simbol Budaya.

REFERENSI

- Afroni, S., & Sihabuddin. (2016). Makna Ghuluw dalam Islam: Benih ekstremisme beragama. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 1-12.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia: Religious moderation in Indonesia's diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-60.
- Pudjiastuti, T. (2019). Naskah-naskah kuno di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan: Sebuah tinjauan awal. *Manuskripta*, 9(1), 187-201. <https://doi.org/10.1234/manuskripta.v9i1.1234>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi beragama di Indonesia. *Intizar: Jurnal*, 25(2), 101-110.
- Farida, U. (2020). Kontribusi dan peran KH. Hasyim Asy'ari dalam membingkai moderasi beragama berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 8(2), 123-136.
- Fauziah Nurdin. (2021). Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 45-58.
- Hasanah, M., & Nurdin, A. (2024). Implementasi pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45-58.
- Irama, Y., & Channa, L. A. W. (2021). Moderasi beragama dalam perspektif hadis. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, 5(1), 15-28.
- Luthfi, A., & Muhibbuddin. (2021). Liberalisasi pemikiran Islam dan kritik terhadap Islam liberal. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 99-110.
- Mahmud, R., & Syafrudin, A. (2023). Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran modern. *Jurnal Pendidikan Multikultural*, 8(2), 112-125.
- Muhtar, M. Z. (2021). Moderasi beragama dalam kitab tasawuf Al-Muntakhabāt karya KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19(1), 33-44.

Naskah Salasila Kutai

Naskah Panji Salatin, Kutai Kartanegara

Naskah Baraja Niti, Kutai Kartanegara

Naskah Hikayat Raja Banjar dan Kotaringin, Kalimantan Selatan

Naskah Koleksi H. H. Abdurrahman Husin Fallughah, Pontianak

Naskah Puisi Pangeran Syarif Pontianak

Nuridin, F. (2021). Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 18(1), 45-58.

Rahman, A., & Arifin, S. (2023). Transformasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, 15(1), 78-92.

Rohman, M., Akmansyah, M., & Mukhibat, M. (2022). Mainstreaming Strategies of Religious Moderation in Madrasah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 95-118. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v22i1.3806>

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Widodo, S., & Supardi, K. (2023). Model pembelajaran berbasis kearifan lokal nusantara. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9(2), 167-180.

